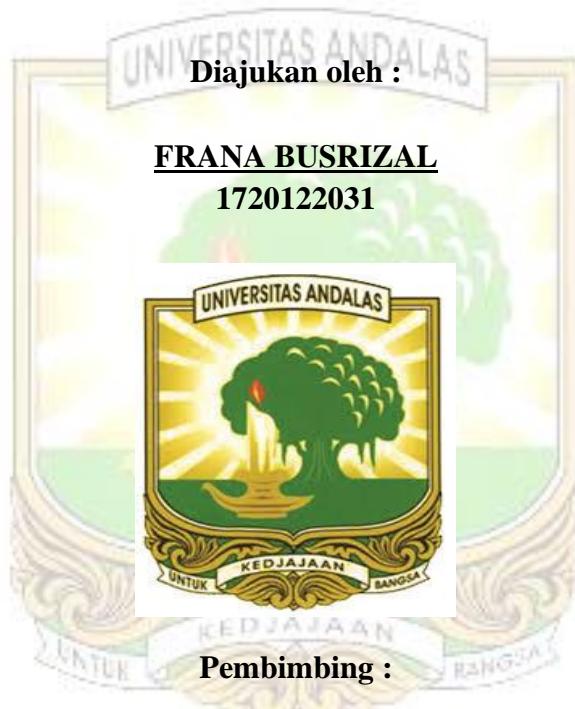


TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA

(Studi Kasus Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata 2
Megister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas*



Dr. Yuslim, S.H., M.H

Dr. Khairani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MEGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA

(Studi Kasus Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang)

**(Frana Busrizal, 1720122031, Program Studi Megister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 111 Halaman)**

ABSTRAK

Di Indonesia Notaris merupakan salah satu jabatan yang memberikan jasa kepada masyarakat untuk menuangkan keinginannya kedalam bentuk tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 15 angka (1) UUJN tentang Kewenangan Notaris, namun dalam kenyataannya peran Notaris dalam memberikan pelayanan jasa berupa akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan untuk melayani masyarakat pada bidang perdata, seringkali dijadikan turut tergugat/tergugat contoh dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang terhadap Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg, dimana Notaris sebagai pihak yang juga ikut dilibatkan dalam perkara antara para pihak yang bersengketa sehingga memunculkan anggapan bahwa Notaris merupakan pihak dalam akta. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum terkait akta yang dibuatnya? b). Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg? c). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Notaris dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Pdg untuk mempertahankan akta yang dibuatnya? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Notaris yang menjadi turut tergugat atau tergugat didalam perkara perdata, maka terhadapnya ketentuan Pasal 66 UUJN tidak terlaksana sehingga dalam perkara ini Notaris belum terlindungi haknya selaku pejabat umum. 2). Kekuatan pembuktian dari akta Notaris dalam Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang adalah akta dengan kekuatan pembuktian dibawah tangan yang dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. 3). Upaya-upaya yang dilakukan Notaris dalam Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang untuk mempertahankan akta yang dibuatnya adalah dengan melakukan gugatan balik terhadap pihak yang menggugat Notaris yakni Notaris membuktikan bahwa akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Notaris, Akta Otentik*

LEGAL PROTECTION AGAINST NOTARY IN CIVIL MATTERS RELATING TO THE DEED

(Case Study Lawsuit Number 77/Pdt. G/2015/Padang District Court)

**(Frana Busrizal, 1720122031, Megister Kenotariatan Study Program,
Faculty Of Law Of Andalas University, 2019, 111 Pages)**

ABSTRACT

In Indonesia Notary is one of the departments that provide services to the public to pour their wishes into a written form as stipulated in article 15 digit (1) UUJN about notary Authority, but in reality the role of notary In providing services in the form of an authentic deed as a tool of evidence in the court to serve the public in the civil field, often used as a defendant/defendant for the civil lawsuit in the Padang District Court against the article number 77/PDT. G/2015/PN PDG, where notary as a party also involved in the case between the parties to the dispute that raises the assumption that the notary is the party to the deed. The problem formulation in this study is: a). How is the legal protection of the notary in a civil lawsuit against the law regarding the deed he made? b). How is the proving power of the deed made by the notary in article 77/PDT. G/2015/PN PDG? c). What are the efforts of the notary public in article No. 77/PDT. G/2015/PN PDG to defend the deed he made? The approach used in this study is sociological juridical. This research uses primary and secondary data. Data is analyzed qualitatively. The results showed that: 1) the notary who became a defendant or defendant in a civil lawsuit, then the provisions of article 66 UUJN not carried out so that in this case the notary has not protected its rights as a general officer. 2). The proof of the notarial deed in civil lawsuit No. 77/PDT. G/2015/Padang state court is a deed with the force of proof under hand and is deemed never to have been present or never made. 3). The efforts of the notary public in the civil lawsuit number 77/PDT. G/2015/Padang state court to defend the deed he made is to make a counterclaim against the party who sued the notary notarized proving that The deed has the power to prove perfect.

Keywords: *Legal Protection, Notary, Authentic Deed*